

**ANOMALI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIAM DI TINGKAT
LOKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK
SASTRO M. WANTU**

Abstract

Anomaly of arrangement involving the relationship of political economy and regional authorities is one of the most serious struggle that has been draining the political economic social and culture history of travel expensive in the nation of Indonesia. Arguments that can be traced from the political economic approach that the political arrangements, governance and economic character of decentralization or region autonomy, among others, the sharing or revenue and empowering localities. Especially for revenue sharing is expected to provide economic satisfaction for the region, but what happens is inequality between regions of different natural resources. Another problem area that many feel their area of interest can be enforced solely to exclusive exploration and exploitation of natural resources.

Kata Kunci : *Anomali, Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Lokal, Ekonomi Politik.*

1. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi yang mengubah segala tatanan antara lain kehidupan politik, pemerintahan dan administrasi baik di tingkat pusat dan daerah telah membuka arena lokal untuk lebih dekat dengan kepentingan mengurus masyarakatnya terutama memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan. Sehingga pemberian otonomi secara luas kepada daerah merupakan resep politik untuk menciptakan sebuah stabilitas negara secara keseluruhan. Mengingat aspirasi dalam bentuk euphoria demokrasi lokal telah menciptakan masyarakat sangat sensitive untuk menentu peran yang lebih luas yang sebelumnya di bawah

bayang-bayang otoritarian dan sentralistis.

Karena itu ada empat parameter yang harus diakomodasi dalam menerapkan otonomi daerah yaitu *sharing of power*, penghormatan terhadap identitas daerah, empowerment lokalitas dan sharing of revenue. Pengalaman Indonesia itu sendiri selama ini berkisar pada empat hal tersebut yang paling sensitive, an selalu menjadi ganjaran hubungan pusat an daerah dalam sejarah Indonesia yang berakibat pada instabilitas negara. Sebetulnya *sharing revenue* akan memberikan kepuasan ekonomi bagi daerah-daerah sebagai sumber dan modal pembangunan. Akan tetapi bagi Indonesia terdapat peluang yang sangat besar daya alam yang

berbeda. Tetapi sebaliknya pengalaman dibanyak negara menunjukkan bahwa sebuah strategi pembangunan yang tepat dan pengembangan alokasi anggaran yang tepat dan sistem distribusi nasional yang bagi akan mampu menjembatani persoalan konflik. Oleh karena itu kecenderungan otonomi daerah di Indonesia mencerminkan dua hal yang sangat yang bertolak belakang satu sama lain yaitu : satu sisi otonomi daerah merupakan jalan terbaik untuk memecahkan persoalan di daerah termasuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain pemerintah pusat semakin jauh menguras daerah yang memiliki sumber daya alam seperti Papua, Kalimantan dan Sulawesi, yang tentunya memperluas perlawanan daerah-daerah yang sumber daya alamnya dieksploitasi secara terus menerus (Cornelis Lay, 2003).

Eksplorasi sumber daya alam secara massive dengan logika kapitalisme menyebabkan daerah-daerah akan terus mengalami kemerosotan kekayaan alamnya ditambah dengan pengrusakan lingkungan. Napsu untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam ini seringkali memicu berbagai konflik horizontal dan vertikal dimasyarakat belum termasuk kekerasan negara terhadap masyarakat yang ingin mempertahankan ekosistem kehidupan mereka yang memiliki nilai capital bagi negara dan para pencari keuntungan (pomodal baik asing maupun domestik). Realita social yang ada di daerah dapat dilihat dari kasus perusahaan penambangan emas Freeport di Papua, penambangan emas Newmont di Sulawesi Utara yang

keduanya perusahaan milik Amerika Serikat, perusahaan penambangan yang baru dirintis di provinsi Gorontalo yaitu Gorontalo Mineral.

Masyarakat di daerah harus menjadi penonton terhadap pengelolaan hasil sumber daya alamnya di tengah-tengah kampanye pemerintah daerahnya yang ingin meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Akan tetapi faktanya sangat jauh dari idealisme yang dikumandangkan, karena kualitas yang dijanjikan tidak kunjung menyelesaikan kehidupan masyarakat yang bergelimang dengan kemiskinan. Sebagai catatan bahwa di provinsi Gorontalo yang selalu didengungkan secara nasional pada masa gubernur Fadel Muhammad ternyata angka kemiskinan sangat tinggi dan tergolong peringkat empat sebagai daerah termiskin di Indonesia berdasarkan data tahun 2010 23,16% penduduk miskin (Sastro, 2012). Kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam yang cukup besar di tingkat daerah tentu secara logika tidak rasional, dimana masyarakat hidup di tengah-tengah kerakusan aktor-aktor daerah dan Jakarta serta kapitalisme Amerika yang mencari keuntungan sebesar-besarnya yang berdampak pada pengrusakan lingkungan.

2. Teorisasi

A. Pendekatan Ekonomi Politik

diakronis teori ekonomi politik berkembang pada akhir abad ke delapan belas dan tercatat sebagai ekonomi politik yang tidak hanya di kembangkan Marx tetapi juga David Ricardo, Thomas Malthus, Jeremy dan John Stuart Mill. Pemikiran-pemikiran mereka dititik beratkan atau difokuskan pada kapitalisme dan evolusi yang

begitu cepat berkembang di Eropa khususnya di Inggris. Selain itu dikalangan pemikir Islam seperti Abd-al-Rahman-ibn-Khaldun mengelaborasi pandangan dari sudut materialistis dipandang dari sejarah. Selanjutnya perhatian utama ekonomi politik diantara abad keempat belas dan ketujuh belas adalah sifat dasar kekayaan adalah sistem individu pasar (dalam Ronald Chilcote, 2000 : 2-3).

Selain itu Politik ekonomi menurut Smith dianggap sebagai dua tujuan yang berbeda yaitu : pertama, menyiapkan sebanyak mungkin pendapatan bagi masyarakat ; kedua, memberikan kepada negara kemakmuran dengan pendapatan yang cukup untuk melayani masyarakat (Hannu Nurmi, 2006 : 1). Selain itu Mill melihat bahwa ekonomi politik adalah untuk kepentingan negara yang mana ekonomi politik mempunyai dua tujuan yaitu konsumsi bagi masyarakat dan memberikan secara terbuka konsumsi tersebut (dalam Hannu Nurmi, 2006 : 1). Sementara itu perdebatan lainnya muncul dari ekonomi politik klasik yang dilakukan oleh Robert Brenner (1977) dalam karyanya tentang Catatan Sebuah pilihan dan juga mengenai pendekatan Sistem dunia oleh Immanuel Wallerstein (1974). Ia menganggap adanya suatu sistem sosial yang lebih besar dari pada negara yang menentukan perilaku negara dan aktor-aktor lain dalam sistem itu. Sistem kapitalis merupakan suatu sistem yang telah menciptakan suatu pembagian kerja internasional yang membagi dunia kedalam tiga lapisan yaitu lapisan negara-negara inti, semi pinggiran dan pinggiran. Ketiga lapisan ini saling dihubungkan dengan pasar

dunia yang memperdagangkan komoditi pasar. Dengan demikian posisi masing-masing negara ditentukan oleh hubungan mereka dengan pasar dunia itu. Atau dengan kata lain, peranan dan kemampuan negara-negara itu ditentukan oleh posisi mereka dalam sistem dunia itu (Victor Lippit, 2005).

Lebih jauh Wallerstein (1974) membedakan antara sistem-sistem dunia dan kekaisaran-kekaisaran dunia, sistem dunia (yang tidak perlu mencakup seluruh bumi namun memiliki dimensi-dimensi global) adalah satu unit dengan sebuah pembagian tenaga kerja tunggal dan sistem-sistem budaya majemuk. Dalam pandangan Wallerstein ciri-ciri tersendiri periode setelah renaissance merupakan dinamisme ekspansi kapitalisme dan kegagalan setiap negara tunggal untuk mengambil alih kontrol dan menciptakan sebuah kekaisaran dunia baru. Sementara itu untuk merevisi pendekatan ini.

Berdasarkan berbagai argumentasi di atas Brabant menguraikan inti yang menentukan keberhasilan dan kegagalan ekonomi politik sebagai berikut: pertama, bagian yang penting dari ekonomi politik yakni transformasi lebih awal dari sosial ekonomi, yang bukan hanya terletak pada satu ukuran melainkan dari semua ukuran yang menjadikan sebagai agenda. Ukuran transformasi ekonomi seperti dimulai dengan stabilisasi makro ekonomi seperti harga, perdagangan, reformasi sistem perbankan dan reformasi pasar tenaga kerja; kedua, pada tingkat politik isu yang paling penting mencakup konsensus mengenai pembangunan dan transparansi kelembagaan. Pemerintah membuat ukuran untuk menjamin

kompetisi yang efektif (dalam Mats Lundahl dan Michael Wyzan, 2005 : 19).

B. Kapitalisme

Ada tiga tipe utama model kapitalisme sebagaimana dikemukakan Victor Lippit, 2005 : 5) sebagai berikut : *The first, there is the Anglo-American type, a form of capitalism that emphasizes the role of markets and consequently tends to be extremely harsh in terms of its consequences for human welfare; second, there is the continental European type of capitalism, with its emphasis on the on the welfare state and social democracy; third, there is the east Asian model of state-led capitalism, exemplified especially by the form capitalism has assumed in Japan and South Korea.* (Pertama, ada tipe Anglo Amerika yaitu bentuk kapitalisme bentuk seperti ini menekankan peran pasar dan cenderung berakibat sangat keras, dalam istilahnya memberi konsekuensi terhadap kesejahteraan manusia; kedua ada tipe kapitalis Eropa continental dengan memberi penekanan pada kesejahteraan negara dan demokrasi sosial ; ketiga, ada kapitalis model Asia Timur yang disebut sebagai kapitalisme yang dipimpin oleh negara seperti yang khususnya bentuk kapitalisme yang dianggap berlaku di Jepang dan Korea Selatan).

Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an perdebatan besar antara Robert Brenner (1977) dan Immanuel Wallerstein (1974) yang menaruh perhatian pada sifat alamiah dari kapitalisme. Brunner menganut secara terbuka analisa yang diberikan oleh Karl marx yang melihat esensi kapitalisme dalam hubungan

antara pemilik modal yang diartikan sebagai produk dan tenaga kerja, kekuatan untuk menjual kepada mereka dan kekuatan tenaga kerja supaya mendapatkan nafkah. Para pemilik modal membeli kekuatan tenaga kerja itu dan menggunakannya untuk menciptakan komoditi dengan nilai yang lebih besar dari pada peralatan, bahan mentah dan kekuatan tenaga kerja yang biasa memproduksi barang, dan surplus nilai itu adalah sumber. Hal ini bertentangan dengan pandangan Wallerstein yang melihat bahwa esensi kapitalisme dalam produksi pemilik modal dari komoditas untuk dijual pada pasar dunia. Wallerstein mengakui secara luas berbagai metode kontrol tenaga kerja sebagai konsistensi dengan kapitalisme. Dalam perdebatan tersebut Brenner melihat hubungan tunggal antara pemilik dan produsen (antara pemilik modal dan pekerja). Sebaliknya Wallerstein memandang kapitalisme sebagai kemampuan sistem dunia yang mencakup berbagai hubungan. Permainan sistem pasar sebagaimana dikatakan oleh Wallerstein memiliki peran sentral dalam konsepsi kapitalisme, namun penjualan memainkan pasar dunia (dalam Victor Lippit, 2005).

Teori yang dibangun oleh Michel Aglietta dalam karyanya tentang regulasi kapital, memahami kapitalisme yang berkenaan phase kesuksesan dari setiap hubungan yang terstruktur pada pola ekonomi yang berbeda. Konsep yang dimaksud adalah model regulasi dan penumpukan kekuasaan sebuah rezim dan model pembangunan yang bisa dilihat sebagai analogi terhadap model produksi Marx, hubungan sosial dari produksi dan kekuatan produksi itu

sendiri (dalam Ronald Chilcote, 2000 : 64).

Berdasarkan argumentasi perdebatan dari Wallerstein dan Brenner bila dihubungkan dengan pemikiran Cardoso dan Fallete (1979) mengenai pembangunan yang dihubungkan dengan teori ketergantungan akan menguntungkan konsumen yang lebih makmur dan sungguh akan memperburuk ketidakmerataan pendekatan. Argumentasi mereka menjelaskan bahwa ketika krisis politik di dalam sistem penghambat satu kebijakan ekonomi investasi-investasi publik dan swasta demi pembangunan, alternative yang ada hanyalah membuka pasar bagi modal asing. Tidaklah realistis untuk membayangkan pembangunan kapitalis akan memecahkan masalah-masalah dasar bagi mayoritas penduduk. Oleh karena itu pandangan teoritis yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan diatas, akan dipakai untuk menjelaskan problema emperikal dari pada pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah.

3. Pembahasan

Kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Indonesia mencerminkan dinamika pergulatan pemikiran mengenai ekonomi politik pembangunan yang berkembang dalam ranah dan konstelasi politik di negeri ini. Berbagai pemikiran telah berkembang dalam memahami kebijakan yang telah di Implementasikan oleh pemerintah saat ini yang tentunya berkaitan dengan politik ekonomi pembangunan. Konsep ini tentunya membahas tentang relasi timbal balik antara ekonomi (aktivitas dan usaha ekonomi) dan kekuasaan dan

sekaligus juga menyangkut hubungan kausalitas berupa kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pasar dengan kekuatan ekonomi sebagai sebab dan kejadian politik sebagai akibat atau sebaliknya (Solichin, 2010).

Gerakan sosial itu berfungsi untuk menggerakkan kekuatan dari bawah supaya mampu mengendalikan kondisi-kondisi kehidupan yang fundamental dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dan berupaya untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Oleh sebab itu berbagai upaya ditempuh oleh daerah untuk mendapatkan capital dalam rangka melaksanakan pembangunannya dengan berbagai cara antara lain bagaimana memanfaatkan sumberdaya alamnya disamping mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Bila dilihat dari latar belakang kebijakan ekonomi politik pembangunan mulai dari zaman Orde Baru sampai dengan Era Reformasi, ada dua hal yang ditekankan yaitu penekanan persoalan pembinaan basis materiil bagi kekuatan negara dan penekanan pembangunan ekonomi sebagai proses akumulasi kapital dengan pemeran utama adalah aktor bisnis swasta. Namun realita yang terjadi berupa kegagalan dalam proses pembangunan di Indonesia, misalnya merembaknya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Sehingga praktik kebijakan berupa program pemerintah tidak menyebarkan manfaat sebagaimana dikatakan oleh Esman (dalam Effendi, 2010:178) kebijakan dan program publik itu selalu cenderung menciptakan “*gainers and loser*”.

Berkaitan dengan model kebijakan ekonomi politik seperti itu

yang sedikitnya mengacu pada pola pembangunan yang telah dirancang sejak Orde Baru hingga sekarang (Reformasi) masih tetap berlaku, meskipun dewasa ini praktek pembangunan berkembang di Indonesia diintegrasikan dengan otonomi daerah. Model pembangunan tersebut dikaitkan dengan kebijakan ekonomi politik pembangunan yang pada dasarnya menekankan pembinaan basis materiil bagi kekuatan negara dan model yang menekankan pembangunan ekonomi sebagai proses akumulasi dan reproduksi kapital dengan pemeran utama aktor bisnis. Namun demikian penciptaan modal yang dilakukan oleh aktor dunia usaha tersebut seringkali tidak membawa dampak yang besar bagi masyarakat, tetapi hanya menguntungkan kalangan elit, yang memanfaatkan secara terbukanya kesempatan dan kebebasan melalui otonomi daerah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh bisa kita lihat program pembangunan di provinsi Gorontalo sejak terbentuk hingga sekarang belum mampu mengeluarkan masyarakatnya dari jeratan kemiskinan. Pada hal dana pembangunan dari pemerintah pusat mengalir terus, tetapi program itu secara realita belum mampu dimanfaatkan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data pada tahun 2010 kurang lebih 23,16 % penduduk miskin di Gorontalo. Selanjutnya angka kekurangan gizi pada tahun 2006 mencapai peringkat tertinggi yaitu 41,48%, angka kematian bayi cukup tinggi 67% (Sastro, 2012).

Sehingga instrumen-instrumen kebijakan negara yang diaktualisasi di tingkat lokal yang digunakan untuk

mencapai dua tujuan yaitu: pertama, produksi dan reproduksi kapital; kedua, reproduksi tatanan masyarakat dan politik belum menjadi harapan yang menjajikan di daerah. Kondisi ini kontraproduktif dengan tujuan pertama ini yang diharapkan otonomi daerah yaitu bisa mendorong peningkatan produksi, percepatan sirkulasi kapital dan bisa meningkatkan akumulasi kapital. Tujuan kedua diharapkan terjadinya reproduksi tatanan masyarakat dan politik yang mengharuskan pemerintah untuk menjamin bahwa hubungan sosial yang mendasari proses produksi bisa dilestarikan dan supra struktur harus tetap stabil dan kedaulatan politik harus tetap dipertahankan. Tujuan kebijakan pertama dari otonomi daerah dalam menghasilkan modal banyak diselewengkan oleh aktor pusat dan daerah yang berkolaborasi dengan pihak asing yang lebih mengutamakan keuntungan semata-mata dan hal itu bisa dilihat dari kasus Freeport di Papua, Newmont di berbagai daerah lain, Gorontalo mineral yang dikelola oleh investor dalam negeri yang sesungguhnya dapat mendapatkan capital bagi daerah, namun secara empiris belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka penyimpangan seperti ini seharusnya pemerintah menjaga kestabilan antara kemampuan mendapatkan modal atau produksi dan *trickle down effect* yang berdampak terpeliharanya sumber daya alam yang tentunya pada waktu tertentu akan habis. Karenanya bukan sebuah kebijakan yang kontra produktif yang melepas begitu saja pengelolaan alam di daerah pada hasrat para pemodal, dan elit politik yang bebas nilai, akan

tetapi pada kebijakan yang bertumpu pada akumulasi kapital dalam upaya membangun otonomi daerah yang bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu baik itu kepentingan kerakusan maupun pihak pemodal asing yang memanfaatkan longganya aturan main mengelola otonomi daerah baik dari perspektif ekonomi, politik, sosial maupun hukum.

Namun demikian sangat sulit bagi pemerintah untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut, mengingat sejak Order Baru model perencanaan pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat menjadi sentrum ketergantungan bagi daerah. Sistem alokasi anggaran yang menempatkan pemerintah pusat (Jakarta) seakan-akan sebagai sumber bukan hanya perencanaan tetapi sekaligus pembiayaan bagi daerah-daerah. Sistem pembangunan yang dikembangkan mengeliminir wajah eksploitasi. Sistem yang demikian dianggap sebagai implementasi politik *Stick and Carrots*, misalnya guna menjamin tegaknya kepatuhan daerah pada pemerintah pusat, maka mereka mewajibkan ketersediaan basis materiil dan menghukum yang tidak loyal (Cornelis Lay, 2003).

Selain itu kepincangan lainnya dari pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memecahkan ketegangan dan konflik hubungan yang diharapkan terjadinya reproduksi tatanan masyarakat dan politik yang mengharuskan pemerintah untuk menjamin bahwa hubungan sosial yang mendasari proses produksi bisa dilestarikan dengan kedaulatan politik yang bisa mengancam integrasi bangsa, mengingat pengelolaan sumber daya alam mempunyai nilai ekonomi

yang sangat besar. Kasus Freeport di Papua telah menjadi arena konflik masyarakat antara harapan dan kenyataan keberadaan penambangan ini dengan kondisi masyarakat setempat. Begitu juga kasus Mesuji di Lampung dimana penguasaan lahan kelapa sawit yang dikuasai oleh pihak asing menyeret masyarakat terlibat konflik berdarah antara aparat negara dan masyarakat setempat.

Dengan adanya kewenangan daerah dan tiadanya sikap kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam telah melahirkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dengan ambisi dan bahkan kadangkala bersikap vandalisme dengan merusak ekosistem lingkungan. Keinginan untuk mendapatkan PAD demi kesejahteraan masyarakat sebagai somboyan untuk berlindung terhadap napsu pengurusan semua potensi kekayaan yang dimiliki semua daerah baik hutan, tambang laut dan sebagainya.

Argumen yang digambarkan di atas secara ekonomi politik menunjukkan alasan politis, ekonomi dan *vested interest* para penguasa daerah baik pejabat eksekutif, legislatif dan para pemilik modal, serta kepentingan pemerintah pusat. Akibatnya implikasi dari otonomi dalam hal pengelolaan sumber daya alam, satu sisi akan dengan cepat bagi daerah memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, tetapi pada sisi lainnya malah sebaliknya bisa membawa bencana bagi masyarakat berupa kerusakan. Kondisi ini bisa dilihat provinsi Gorontalo yang memiliki enam kabupaten dan kota yang hampir semua daerah itu menjadi

langganan banjir terutama di kota Gorontalo dimana setiap musim hujan kota ini sebagian besar wilayahnya terendam oleh banjir, sebagai akibat rusaknya taman nasional yang di dalamnya ada penambangan liar oleh masyarakat maupun penambangan yang dilegalkan oleh pemerintah daerah.

Pola jaringan kapitalis yang dijalan dalam prakteknya oleh negara melalui tangan daerah dalam sebuah ruang legalisasi desentralisasi maupun otonomi daerah memiliki keinginan bagaimana melakukan pengelolaan daerah dalam hal ini sumber daya alam tanpa batas dengan berlindung pada kepentingan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya merupakan kamufase dari persengkokalan aktor negara, daerah dan pihak pemodal (asing maupun dalam negeri) yang berorientasi kapitalis. Dimensi keserakahan kapitalis yang menghinggapi para aktor pengelola daerah diperparah dengan keterbatasan daerah dalam hal pengalaman dan keahlian yang dimilikinya sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak luar termasuk asing.

Dengan demikian berdasarkan fakta yang terjadi di daerah dalam penegelolaan sumber daya alam yang tidak lagi dikontrol oleh negara menyebabkan daerah terangsang untuk melakukan eksplorasi kekayaan yang seringkali tidak lagi memenuhi batas kewajaran untuk kepentingan kesejahteraan, sebagaimana dikatakan oleh David Harvey (2006) didorong oleh empat faktor utama sebagai berikut: (1). Privatisasi dan komodifikasi yaitu korporatisasi terhadap asset-asset publik yang

merupakan ciri khas dari neoliberal; (2). Finansialisasi yakni dalam gelombang finansialisasi besar-besaran yang berlangsung setelah tahun 1980 yang dicirikan oleh watak spekulatif dan predatornya; (3). Manajemen dan manipulasi krisis yaitu penuh dengan kecurangan dan merupakan ciri utama dari banyak manipulasi neoliberal melalui proses perangkap utang sebagai suatu cara utama untuk melakukan akumulasi lewat penjarahan; (4). Redistribusi oleh negara yaitu ketika negara berhasil dineoliberalisasikan, maka negara itu menjadi agen primer dari kebijakan-kebijakan redistribusi kekayaan kantong-kantong kelas elit.

Kesenjangan tentunya menimbulkan tidak seimbangya kekuatan aktual daerah sebagai sebuah otoritas politik ekonomi yang berbasis lokal yang berhadapan dengan kekuatan globalisme dengan daya dobrak kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya alam daerah. Dalam beberapa tahun sejak otonomi daerah diberlakukan masyarakat mulai melakukan perlawanan terhadap radikalisme mesin kapitalisme dalam mengelola kekayaan daerah seperti di Papua, Sumatra, Sulawesi dan di Gorontalo dalam bentuk penolakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi kapitalis yang menggunakan aktor daerah yang ingin cepat kaya, di tengah-tengah rakyatnya yang miskin, standar kesehatan yang rendah, gizi buruk dan sebagainya.

Apakah dengan memberdayakan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberian otonomi daerah tidak bisa melepaskan diri dengan kapitalisme? Tentu kita sepakat dengan

kaum ilmunan lain bahwa telah menjadi realita bahwa negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan ekonominya sebagian besar menempuh jalan kapitalisme setelah sekian lama mencoba berbagai ideologi pembangunan lain, yang tentunya berakhir dengan kegagalan. Karena umumnya para pemimpin mereka punya keinginan untuk secepatnya meningkatkan akumulasi kapital dan sumberdaya bagi negerinya untuk membangun ekonomi dan juga kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, terutama bagi para pemimpin mereka yang terlanjur berafiliasi dengan negara-negara kapitalis. Sebagaimana dikatakan bahwa Indonesia sendiri sebagai negara berkembang secara terang-terangan mengikuti jalur kapitalisme meskipun pemimpin negeri ini dengan malu-malu mengatakan negeri yang dipimpinnya mengambil jalan setengah kapitalisme atau paling cocok Indonesia adalah negara *Pseudo Capitalism* (kapitalis gadungan). Model kapitalisme seperti ini hanya mensejahterahkan segelintir orang terutama yang punya kapital, aktor negara yang hidup berfoya-foya ditengah-tengah ratusan juta rakyat yang hidup melarat tanpa ada harapan. Inilah contoh negara gagal dengan meminjam istilah Noam Chomsky (2006) yang menyatakan *Fail State*, dimana para aktor negara termasuk daerah yang berkolusi dengan para kapitalis luar negeri (negara pemilik modal) untuk melakukan akumulasi kapital lewat eksplorasi sumberdaya alam di daerah untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam tanpa batas.

Mengingat peran negara yang sangat kuat dalam pengelolaan sumber

daya alam tersebut, hal ini tentunya bisa diterima karena upaya untuk melakukan akumulasi maupun reproduksi kapital sejalan dengan kepentingan negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Sebagaimana dikatakan Supyan Allisa (2007 : 8) bahwa kepentingan negara tersebut dijalankan oleh para aktor pejabat pemerintah untuk mendukung reformasi sebagai prioritas dalam rangka untuk menjamin stabilitas rezim politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya sebagai hasil dari reformasi pasar. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa reformasi pasar tersebut dapat dilakukan melalui tiga faktor yaitu: (1). Faktor pertimbangan ideologi yang ditandai dengan kurangnya dari keberadaan reformasi ekonomi; (2). Upaya reformasi dilakukan karena kegagalan sosial ekonomi; (3). Perlawanan oposisi terhadap upaya dari para ekonomi dan para elit politik memberi jaminan keistimewaan terhadap penataan masa depan ekonomi Supyan Allisa (2007:14).

Oleh karena itu reformasi pasar melalui upaya akumulasi kapital sebagaimana dijelaskan diatas sangat berarti dimana sumberdaya tersebut merupakan modal bagi negara dalam memobilisasi masyarakat. Sehingga tidak mengherankan negara menempuh jalan menuju kapitalisme, meskipun di negara ini angka kemiskinan sangat tinggi. Disamping itu arena ekonomi politik Indonesia dalam penerapan kebijakan pembangunan sejak Order Baru hingga kini orientasi pembangunan selalu berkiblat ke negara-negara kapitalis, dengan sendirinya jalan itulah yang ditempuh sebagai aliansi kepentingan negara

kapitalis dengan Indonesia. Model seperti ini sejalan dengan teori *Discourse and power* yaitu kebijakan pembangunan sebenarnya tidak asli pemerintah Indonesia sendiri, melainkan kebijakan tersebut dipaksakan oleh para donor baik World Bank, IMF dan sebagainya yang dikendalikan oleh negara-negara maju yang kapitalis. Sebagaimana dikatakan Tony Killick (1998) bahwa penetapan tentang kebijakan oleh negara donor tentu dimaksudkan untuk memperbaiki kebijakan sebagai sebuah membenaran yang dikondisikan antara lain : Pertama, bantuan uang dan dukungan dari negara-negara donor bisa digunakan sebagai sumberdaya politik untuk mereformasi pemerintahan dan hal ini mungkin bisa menentukan keseimbangan yang jelas antara pemerintah dan para oposisi; kedua, adanya korban dimana IMF telah begitu lama membiasakan dirinya untuk cenderung membawa pada pemerintah yang diberikan dananya untuk menggunakannya sebagai cambuk yang cepat dan sekaligus sebagai kekuatan luar negeri untuk menekan pemerintah.

Berdasarkan argumentasi teori dan empiris diatas bahwa seyogyanya Indonesia dalam membangun daerah melalui otonomi daerah harus menapaki jalan politik ekonomi yang mengelola sumber daya alam yang berbasis bagi kepentingan masyarakat jangka panjang dengan terpeliharanya ekosistem alam daerah, bukan membangun ekonominya dengan mengambil jalan kapitalis yang cenderung tidak ramah terhadap ekosistem yang tujuan utamanya selalu berpola pada reproduksi kapitalisme

keuntungan sebesar-besarnya yang sering menyengsarakan rakyat.

4. Kesimpulan

1. Diperlukan penataan kembali otonomi daerah dalam sejumlah hal harus dilakukan, mengingat pemahaman otonomi sendiri dikalangan segelintir para elit di daerah sudah disalahgunakan untuk kepentingan sesaat termasuk dalam hal melakukan pengumpulan modal bagi pembangunan daerah.
2. Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan ekonomi politik yang berorientasi kapitalis pada hakekatnya menciptakan kehancuran bagi daerah baik menciptakan kesenjangan sosial dengan meningkatkan tingkat kemiskinan dan juga kehancuran lingkungan.
3. Untuk mengelola sumber daya alam demi pembangunan dalam tataran otonomi daerah tidak bisa dikelola dengan napsu hedonistik, apalagi vandalisme (pengrusakan), namun harus efisien dengan memperhatikan kelangsungan ekosistem lingkungan dan tersedianya kemampuan kualitas dan kuantitas alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Allisa, Supyan, 2007, *The Political Economy of Reform in Egypt: Understanding The Role of Institutions*, Journal International Peace, Publication Department 1779, Massachusetts
- Brenner, Robert, 1977, *The Origins Of Capitalist Development: A Critique Of Neo-Smithian Marxism*, New Left Review, No. 104 Juli/August
- Cardoso, Fernando Henrique and Enzo Falette, 1979, *Dependency And Development In Latin America*, Barkeley, University of California Press
- Chilclote H. Ronald, 2000, *Theories of Comparative Political Economy*, Westview Press A member of the Brooks Group, United States of American
- Chomsky Noam, 2006. *Failed State*, Metropolitan Books Henry Holt and Company New York
- Effendi, Sofyan, 2010, *Reformasi Tata Kepemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk mendukung Demokratisasi Politik Dan Ekonomi Terbuka*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Harvey David, 2006. *A brief history of neo-liberalisme*, Oxford university press
- Nurmi Hannu, 2006. *Models of Political Economy*, Roudlege Taylor & Francis Group, London and New York
- Killick Tony, 1998, *Political Economy Policy Change*, Roudlege Taylor & Francis Group, London and New York
- Lay Cornelis, 2003, *Otonomi Daerah dan Ke-Indonesian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Lippit D. Victor, 2005. *Capitalism*, Raudlege Taylor & Francis Group, London and New York
- Lundahl Mats and Michael L. Wyzan, 2005, *The Political Economy of Reform Failure*, Roudlege Taylor & Francis Group, London and New York
- Solichin Abdul, Wahab 1999, *Ekonomi Politik Pembangunan Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis Moneter*, Malang, Brawijaya University Press
-, 2010, *Kompilasi dari Materi Kuliah Ekonomi Politik Kebijakan Publik*, Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang
- Wallerstein, Immanuel, 1974, *The Modern World System: Capitalism Agriculture and The Origins of The European World Economy in The Sixteenth Century*, New York, Academic Press
- Wantu, Sastro, Mustapa , 2012, *Rekrutmen Pejabat Pemerintah Daerah Dalam Perspective Bureaucratic Politics*, Disertasi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, Tidak Dipublikasikan